



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : M. MASYKURI ZAEN
- Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
- NHK : 823844

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 655.500.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 227 m2/175 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 655.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 131.700.000

- MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2002, LAINNYA Rp. 700.000
- MOTOR, YAMAHA MIO GT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
- MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 22.500.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 122.427.330

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 75.000.000

**Sub Total** Rp. 1.007.127.330

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.007.127.330

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.